

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR TABEL	ix
INTISARI	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 15	
B. Peraturan Daerah.....	22
C. Model Analisis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	31
D. Harmonisasi Peraturan Daerah	38
E. Kantor Wilayah Kementerian Hukum	44
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Bahan Penelitian	51

D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Tahap pengumpulan dan pengolahan data.....	55
F. Analisis Data.....	57
G. Jalannya Penelitian	58
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	59
A. Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Proses Harmonisasi, Pembedaan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Perubahan Kedua Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	59
1. Kedudukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dalam Proses Legislasi Daerah.....	59
2. Tinjauan Terhadap Perubahan Pasal 58 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	81
3. Pengharmonisasian Sebagai Bentuk Pengawasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah	89
B. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta	102
1. Mekanisme dan Prosedur Pengharmonisasian Raperda di Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY	102
2. Pengaruh Kesultanan Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	120
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	134